

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, pemerintah sedang gencar untuk melakukan pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan baik material maupun spiritual untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita memiliki beberapa faktor pendukung salah satunya adalah pembangunan daerah, karena ketika adanya peningkatan pembangunan daerah merupakan integrasi dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu fokus pembangunan pemerintah yang nantinya akan mendukung pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang perekonomian. Menurut Arsyad dalam Sabana (2007) Pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi merupakan sebuah proses dimana pemerintah daerah setempat dan masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada dan membangun suatu pola kerjasama untuk terciptanya lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Setiap daerah tentunya memiliki perbedaan potensi sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil produksi masing-masing daerah. Ada daerah yang mampu memproduksi suatu

komoditas dengan harga yang rendah dan ada yang harus membayarnya dengan harga yang relatif mahal. Hal inilah yang selajutnya memngakibatkan adanya daerah yang mampu untuk cepat tumbuh, cepat berkembang serta mengalami pertumbuhan yang lambat.

Pemerintah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang membahas tentang kebijakan pemerintah pusat dalam melimpahkan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri kepada pemerintah daerah melalui perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang didasarkan pada kemampuan ataupun potensi yang ada serta permasalahan yang harus dihadapi di daerah tersebut (Nuraini, Setiartiti, 2017).

Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri, terdiri atas satu kota dan empat kabupaten yang dari masing- masing kabupaten/ kota tersebut memiliki keadaan geografis yang berbeda- beda yang menyebabkan potensi ekonomi yang dimilikipun akan berbeda- beda, sehingga PDRB yang di hasilkan oleh masing- masing kabupaten/ kota akan berbeda pula sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

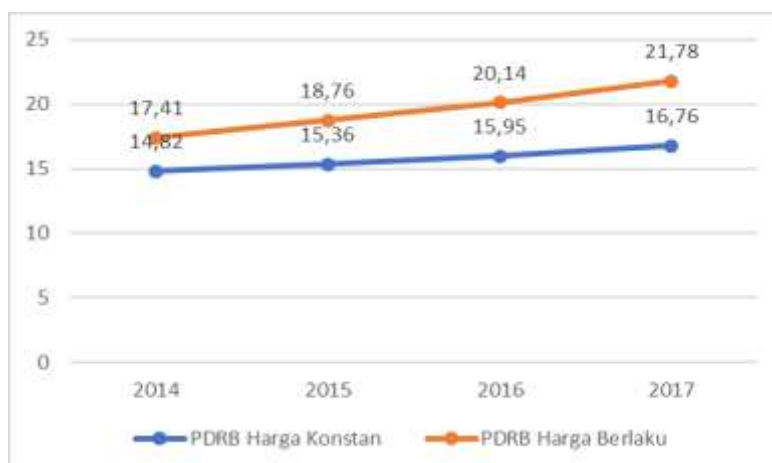
Tabel 1. 1 PDRB, Laju pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017, Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	PDRB (Miliar Rupiah)	Laju PDRB (%)	Jumlah Penduduk	Kontribusi terhadap seluruh Kabupaten /Kota
Yogyakarta	24772	5,24	422732	26,24
Bantul	17212	5,1	995264	18,97
Sleman	31156	5,35	1193512	33,6
Kulonprogo	6674	5,97	421295	7,6
Gunungkidul	12282	5	729364	13,59
DIY	92301	5,26	3762167	100

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2018

Tabel di atas memperlihatkan PDRB, laju pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk dan luas setiap kabupaten/ kota di provinsi DIY. Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 422732 jiwa dan luas wilayah 32,50 km² memiliki PDRB sebesar Rp. 24772 miliar. Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk 995264 jiwa dan luas wilayah 506,85 km² memiliki PDRB sebesar Rp. 17212 miliar. Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk 1193512 jiwa dan luas wilayah 574,82 km² memiliki PDRB sebesar Rp. 31156 miliar. Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 421295 jiwa dan luas wilayah 586,27 km² memiliki PDRB sebesar Rp. 6674 miliar. Dan kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah penduduk 729364 jiwa dan luas wilayah 1485,36 km² memiliki PDRB sebesar Rp. 12282 miliar. Kabupaten/kota dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah kabupaten Kulon Progo namun dalam kontribusinya untuk Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo merupakan penyumbang jumlah PDRB terkecil dengan jumlah 7,60 persen di bandingkan dengan Kabupaten yang lainnya.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita, yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dengan total penduduk. PDRB perkapita akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Sedangkan nilai PDRB bergantung pada potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang dimiliki wilayahnya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian secara riil di suatu daerah. Seperti pada gambar dibawah yang menjelaskan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo:



Sumber : PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2017

Gambar 1. 1 PDRB per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 (Juta Rupiah)

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014- 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 14,82 juta rupiah dan meningkat 16,76 juta rupiah pada tahun 2017.

Pembangunan ekonomi yang pesat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cepat, dan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sama seperti peningkatan PDRB yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan output tiap sektor ekonomi yang terus berkembang. Terbukti dengan PDRB kabupaten Kulon Progo yang di sumbangkan oleh 17 lapangan usaha.

Tabel 1.2. Di bawah ini menunjukkan bahwa, perekonomian Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014 hingga tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha yang menjadi penyumbang pemasukan daerah terbesar yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mendominasi struktur perekonomian kabupaten Kulon Progo dari seluruh lapangan usaha yang ada.

Tabel 1. 2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1442659.90	1566769.25	1658813.37	1715660.90
2	Pertambangan dan Penggalian	101818.07	109892.09	115601.79	132102.23
3	Industri Pengolahan	871865.30	925813.92	1014200.25	1122792.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4859.84	5658.49	6824.11	8345.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10007.66	10522.21	11195.53	11966.25
6	Konstruksi	602695.75	649776.42	710844.13	825885.52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	928413.43	1008690.03	1131565.10	1271959.30
8	Transportasi dan Pergudangan	593001.41	636391.39	669410.86	708679.70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267891.21	296720.55	324991.30	350564.80
10	informasi dan Komunikasi	364480.93	382516.59	413772.07	451136.11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	229410.74	255816.33	271629.10	286018.10
12	Real Estate	233583.01	256043.69	281442.35	310731.61
13	Jasa Perusahaan	20295.75	22111.88	23424.71	25128.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615523	684126.51	760654.81	846924.14
15	Jasa Pendidikan	409065.84	461610.87	491522.68	532472.66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100500	112612.98	119451.29	130305.40
17	Jasa Lainnya	260500	286474.78	307111.17	332663.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo 2018

Analisis potensi ekonomi yang dilakukan oleh (Yurlina, dkk: 2015) di Kabupaten Batanghari menunjukkan bahwa di wilayah ini ada lima sektor yang menjadi sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor jasa- jasa lainnnya. Analisis lain yang di lakukan oleh (Gafur, dkk: 2016) di Kabupaten Bungo menghasilkan bahwa yang menjadi sektor basis saat ini dan dimasa mendatang adalag sektor

bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Nuraini, dkk: 2017) di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa ada 2 sektor yang menjadi sektor unggulan di antara 17 total jumlah sektor yang ada yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sektor industri pengolahan.

Menurut Arsyad (1999), tujuan terpenting dari adanya pembangunan ekonomi daerah adalah agar meningkatnya jumlah kesempatan kerja untuk penduduk daerah itu sendiri. Dan sudah di jelaskan juga dalam Al- Qur'an di tuliskan dalam surah Ar- Rad ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهُ إِنَّ

Yang artinya “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka*”.

Melihat dari ayat di atas maka setiap pemerintah daerah harus memiliki strategi pembangunan daerah. Dan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat daerah harus saling bekerjasama dan mendukung untuk menciptakan inovasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Dalam pengembangan ekonomi ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang diambil dalam proses pengembangan ekonomi di suatu daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendapatkan data serta informasi yang dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan suatu daerah tersebut, analisis yang mendalam terkait dengan keadaan suatu daerah harus dilakukan. Dengan melihat data dan fakta di atas serta pentingnya masalah pembangunan ekonomi terkait dengan pertumbuhan

ekonomi dengan memaksimalkan sektor unggulan di kabupaten kulonprogo, maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini yaitu: “**Analisi Sektor Basis Dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017**”, dimana penelitian ini berfungsi untuk melihat strategi apa yang mampu di berikan untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

B. Batasan Masalah

Pembangunan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas, untuk itu penulis perlu membatasi pembahasan pada penelitian ini yang difokuskan pada :

1. Menjelaskan struktur ekonomi dan potensi ekonomi yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo
2. Periode dalam penelitian ini yaitu tahun 2013 hingga tahun 2017
3. Data yang digunakan adalah data produk regional domestik bruto atau PDRB Kabupaten Kulon Progo dan DIY tahun 2013- 2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor- sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana strategi yang dapat di terapkan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sektor ekonomi yang termasuk sektor basis yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Kulon Progo
2. Menganalisis dan mengetahui strategi yang harus diterapkan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat ilmiah
 - a. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak lain yang berkepentingan untuk penelitian sejenis atau lanjutan.
 - b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang sektor basis dan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membuat kebijakan pembangunan daerah.